

PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI

Coastal Area Development In Abeli Sub-District Kendari

Muis^{1*}, La Sara¹ dan Dasmin Sidu²

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara
email: ^{1*}muisfpik@gmail.com, ¹lasara_unhalu@yahoo.com

²Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara,
email: dasminsidu_07@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 1) tingkat perkembangan kawasan pesisir, 2) persepsi stakeholder mengenai pengelolaan kawasan pesisir, dan 3) strategi pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli Kota Kendari. Total pendapatan masyarakat terbesar dan terkecil masing-masing ditemukan di Kelurahan Pudai Rp862.070 dan Kelurahan Lapulu sebesar Rp322.317,38. Hasil *analitical hierarchy process* mencakup pendapat perseorangan dan pendapat gabungan. Hasil analisis gabungan didapatkan bahwa yang bertanggung jawab dari ketiga aspek tersebut adalah pemerintah (nilai bobot 0,695), lalu berturut-turut swasta (nilai bobot 0,220) dan masyarakat (nilai bobot 0,085). Hasil analisis pendapat gabungan dalam perumusan strategi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Abeli menempatkan pengembangan budidaya laut yang diprioritaskan (nilai bobot 0,627), dan berturut-turut industri (nilai bobot 0,182), pengembangan pariwisata (nilai bobot 0,108) dan pelabuhan peti kemas (nilai bobot 0,083). Strategi pengembangan desa-desa pesisir seharusnya berdasarkan pengamatan kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi pola-pola pengembangan sumberdaya manusia, informasi pasar, sumberdaya modal dan investasi, kebijakan investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan, sedangkan faktor eksternal meliputi kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah, perdagangan bebas dan otonomi daerah.

Kata Kunci : *analitical hierarchy process, persepsi stakeholders, pengembangan kawasan pesisir*

ABSTRACT

This study is aimed to describe development level, the stakeholders perception and strategy of coastal area development. The highest and the lowest of income of community were found at Pudai of Rp862 070 and Lapulu of Rp322,317.38 respectively. The Analytical Hierarchy Process (AHP) analysis which is based on individual and collective opinions. The results of combined analysis found that the responsible of the above third aspect is the government (the weight of 0.695), and a row of private (0.220 weight values) and community (weighted value of 0.085). The results of the combined analysis of opinion in the formulation of development strategies in Abeli coastal aquaculture development puts a priority (weighting value 0.627), industry (weighted value 0.182), the development of tourism (weighted value of 0.108) and the container port (the weight 0.083) respectively. Development strategies of coastal villages in Abeli District should be based on observations of the internal conditions, and anticipating external developments. Internal factors include patterns of human resource development, market information, capital resources and investment, investment policy, infrastructure development, capacity building of local institutions and governance, as well as a variety of collaboration and partnership, while external factors include the gap of problem areas and capacity building of regional autonomy, free trade and regional autonomy.

Key words: *analitical hierarchy process, coastal area development, stakeholder perception.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa/kelurahan di Kecamatan Abeli merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Teluk Kendari yang masih terpinggirkan jika dibandingkan dengan desa/kelurahan lain yang ada di Kota Kendari. Padahal ini sangat potensial menjadi kantong-kantong pemukiman masyarakat miskin. Budiharjo (1997) menjelaskan bahwa kota dapat menyediakan fasilitas dan pelayanan sosial yang terbaik, namun sekaligus juga mewedahi kehidupan kaum papa yang serba termarginalkan, kumuh, tidak sehat, sarat dengan pencemaran dan ketidakteraturan.

Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di kawasan pesisir di Kecamatan Abeli menjadikan wilayah ini termasuk wilayah yang rawan pada bidang sosial ekonomi. Reksohadiprodjo dan Karsene (1998) menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat di daerah ini antara lain adalah fluktuasi musim penangkapan, keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti,

lemahnya jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan.

Wilayah pesisir Kecamatan Abeli mempunyai banyak potensi sumberdaya. Potensi sumberdaya yang ada sekarang dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi potensi pariwisata dan industri budidaya pantai. Kelurahan Bungkutoko memiliki hutan mangrove sekitar 2 ha untuk dikembangkan menjadi hutan mangrove wisata. Pantai Nambo dan Pulau Bungkotoko yang juga berpotensi untuk pengembangan pariwisata pantai masing-masing seluas 5 ha. Kegiatan lain yang dapat pula dikembangkan adalah usaha budidaya laut (*mariculture*). Usaha budidaya lainnya pula adalah rumput laut yang cukup berkembang pesat di Kelurahan Sambuli, Tondonggeu dan Purirano.

Hingga saat ini telah terolah sekitar 80 ha dengan tingkat produksi mencapai 1,36 ton ikan yang terdiri dari sekitar 0.9 ton ikan kerapu, dan ikan lainnya (beronang, bandeng, kuwe, dan lain lain) sekitar 0.46 ton serta rumput laut sekitar 324,6 ton (Kasim *dkk.*, 2007).

Potensi sumberdaya tersebut, jika tidak dengan hati-hati dimanfaatkan maka dapat berpotensi mendorong berbagai

pihak pengguna (*stakeholders*) untuk mengeksploitasinya secara berlebihan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ancaman terhadap status kawasan ini salah satunya dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik dan limbah industri (limbah industri perikanan yang ada di Kelurahan Pudai dan industri somel di Kelurahan Lapulu). Pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta adanya konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang berakibat pada terjadinya konflik sosial.

Langkah awal dalam upaya pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan adalah melakukan kegiatan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir.

Sebagai langkah awal dalam menciptakan reorientasi kebijakan pola pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir Kecamatan Abeli, maka dilakukan penelitian yang dapat mengetahui tingkat perkembangan wilayah pesisir di Kecamatan Abeli, baik kondisi saat ini, di masa mendatang dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang mungkin timbul.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat perkembangan pemanfaatan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli
2. Bagaimana persepsi atau pandangan para stakeholder mengenai arah pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli
3. Bagaimana strategi pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli ke depan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat perkembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli Kota Kendari.
2. Persepsi para stakeholder mengenai pengelolaan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli.
3. Strategi pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli.

D. Manfaat Penelitian

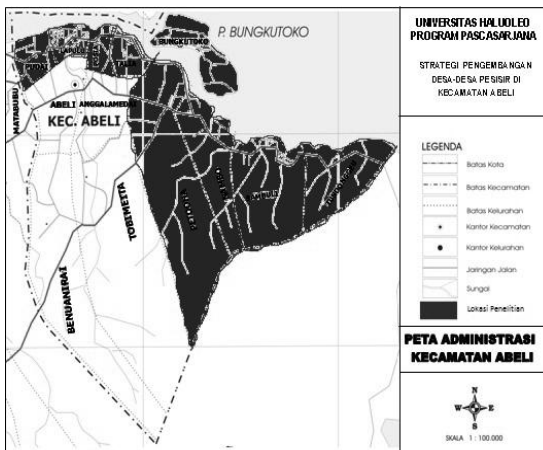
Hasil Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Kendari dalam menyikapi permasalahan di kawasan pesisir dan menyusun rancangan dan perencanaan pengembangan wilayah. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam hal pengembangan kawasan pesisir ke depan.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2010 sampai Juni 2010. Lokasi penelitian meliputi 10 kelurahan pesisir di Kecamatan Abeli (dari 13 kelurahan) Kota Kendari (Gambar 1).



Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Abeli

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktor atau pengguna lahan (*stakeholders*) terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pemilihan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan

pertimbangan responden adalah aktor atau pengguna lahan (*stakeholders*).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 *stakeholders*, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Kota Kendari:
 - Eksekutif: Bappeda (1 orang), Dinas Kelautan dan Perikanan (1 orang), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (1 orang), Dinas Perhubungan (1 orang), Camat Abeli (1 orang), Lurah desa pesisir (2 orang).
 - Legislatif: Anggota DPRD Perwakilan Abeli (1 orang).
- b. Staf Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari (1 orang)
- c. Swasta: pengusaha industri (1 orang)
- d. Tokoh masyarakat nelayan (1 orang), tokoh masyarakat pesisir non-nelayan (1 orang),
- e. LSM (1 orang)

Informasi dari responden diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan kuisioner.

C. Variabel Yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini disajikan adalah :

1. Aspek sosial meliputi : penyerapan tenaga kerja, tersedianya akses pelayanan, kesenjangan kesempatan kerja.

2. Aspek ekonomi meliputi : peningkatan pendapatan masyarakat, peluang usaha sektor informal, kesenjangan pendapatan; PDRB dari sektor : angkutan dan komunikasi, keuangan, jasa-jasa, pertanian, industri, listrik, gas dan air, konstruksi dan perdagangan.
3. Aspek lingkungan meliputi : konservasi lingkungan, pencemaran lingkungan, keamanan dan kenyamanan

Setiap variabel pada masing-masing aspek terlebih dahulu disusun dalam tabel hingga membentuk baris dan kolom. Baris yang terbentuk mengindikasikan perbandingan antara masing-masing variabel pada aspek tersebut. Oleh karena itu, kolom pertama menganut variabel terbanding, sedangkan kolom terakhir menganut variabel pembanding. Di antara keduanya, terdapat kolom yang menganut angka-angka skor yang terdiri dari satu hingga sembilan. Teknik pengambilan data dapat membentuk format dengan memberi tanda checklist (\checkmark) setiap kolom

D. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan tentang bagaimanakah tingkat perkembangan pesisir, dilakukan analisis deskriptif berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan kawasan setiap kelurahan/

desa. Alat bantu yang digunakan untuk uji standar deviasi ini adalah perangkat lunak *excell*, dengan ketentuan :

1. Jika tingkat perkembangan suatu wilayah kurang dari selisih antara nilai rata-rata tingkat perkembangan dengan standar deviasinya maka tingkat perkembangan wilayah tersebut rendah.
2. Jika tingkat perkembangan suatu wilayah berada diantara nilai selisih rata-rata tingkat perkembangan dengan standar deviasinya hingga jumlah dari keduanya maka tingkat perkembangan wilayah tersebut adalah sedang.
3. Jika tingkat perkembangan suatu wilayah lebih dari jumlah antara nilai rata-rata tingkat perkembangan dengan standar deviasinya maka tingkat perkembangan wilayah tersebut adalah tinggi.

Alat analisis hierarki proses dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua bagaimana persepsi atau pandangan stakeholder mengenai arah perkembangan dan pengelolaan kawasan pesisir dan permasalahan ketiga bagaimana strategi pengembangan kawasan pesisir.

Pendekatan AHP menggunakan Skala Saaty (1993) yaitu :

1. Tingkat kepentingan satu adalah kedua elemen sama penting, dengan penjelasan dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
2. Tingkat kepentingan tiga adalah elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lain, dengan penjelasan bahwa pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
3. Tingkat kepentingan lima adalah elemen yang satu lebih penting dari pada elemen yang lain, dengan penjelasan bahwa pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
4. Tingkat kepentingan tujuh adalah satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya, dengan penjelasan bahwa satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
5. Tingkat kepentingan sembilan adalah satu elemen mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya, dengan penjelasan bahwa bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
6. Tingkat kepentingan dua, empat, enam, dan delapan adalah nilai-nilai

antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan, dengan penjelasan bahwa nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan

7. Tingkat kepentingan dengan nilai kebalikan yaitu jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.

HASIL

Tingkat perkembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli Kota Kendari dapat dilihat pada tabel 1 berikut ;

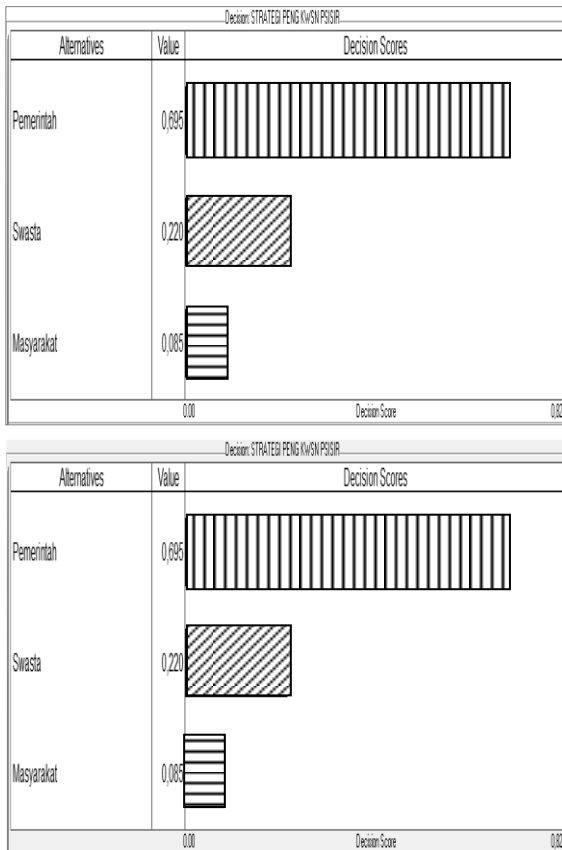
Tabel 1 Jumlah Keluarga Prasejahtera di Daerah-daerah Pesisir Kecamatan Abeli Kota Kendari

No	Kelurahan	Jumlah Keluarga Prasejahtera
1	Pudai	114
2	Lapulu	467
3	Poasia	223
4	Talia	229
5	Bungkutoko	230
6	Petoaha	268
7	Nambo	162
8	Sambuli	231
9	Tondonggeu	128

Sumber : BPS Kecamatan Abeli Dalam Angka 2010

Hasil analisis pendapat gabungan responden (Gambar 2) tentang prioritas pemanfaatan dalam perumusan strategi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Abeli secara berturut-turut

adalah pengembangan perikanan (nilai bobot 0,627), pengembangan industri (nilai bobot 0,182), pengembangan pariwisata (nilai bobot 0,108) dan pelabuhan peti kemas (nilai bobot 0,083).



Gambar 2 Gabungan Pendapat Responden pada Strategi Pengembangan Pesisir di Kecamatan Abeli Kota Kendari

Hasil analisis pendapat gabungan (Gambar 2) pada pengembangan pesisir di Kecamatan Abeli sebagai alternatif pengembangan adalah industri (nilai bobot 0,182). Industri yang ada di Kecamatan Abeli adalah sebagian besar industri perikanan (Pelabuhan Perikanan Samudera). Industri-industri perikanan di

wilayah penelitian telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Abeli. Pernyataan ini didukung dengan hasil survei industri besar dan industri sedang (Tabel 2) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kecamatan Abeli tahun 2011, tercatat 14 buah perusahaan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 951 orang. Hasil data BPS (2011) memperlihatkan status pekerjaan mereka, 908 orang tenaga kerja produksi (95,47%), dan 43 orang (4,53%) adalah tenaga kerja lainnya.

Tabel 2 Industri Besar/Sedang, Tenaga Kerja dan Pengeluaran untuk Tenaga Kerja di Kecamatan Abeli

Kelurahan	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja
Benuanirae	-	-
Puday	9	651
Lapulu	2	181
Abeli	-	-
Anggalomelai	-	-
Tobimeita	1	-
Poasia	2	34
Talia	-	72
Petoaha	-	-
Nambo	-	-
Bungkutoko	-	-
Sambuli	-	-
Tondonggeu	-	-
Jumlah	14	938

Sumber : Survey Rutin Industri Besar/ Sedang Tahunan BPS, 2011

PEMBAHASAN

A. Tingkat Perkembangan Kawasan Pesisir

Tingkat Perkembangan kawasan pesisir ditinjau dari 3 aspek yaitu

Aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan

Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan aspek terpenting yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan/penentuan prioritas arahan pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dampak manfaat yang menunjukkan nilai bobot kriteria pada aspek ini yang lebih besar dari kriteria pada dua aspek lainnya. Dari aspek ini diangkat tiga kriteria yang merupakan faktor-faktor yang mungkin terjadi, yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Di antara tiga kriteria aspek ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat merupakan kriteria dengan nilai bobot terbesar (0,477).

Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera di desa-desa pesisir Kecamatan Abeli (Tabel 1) menggambarkan perlunya memprioritaskan upaya pengembangan kapasitas usaha ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu usaha ekonomi yang perlu diprioritaskan adalah usaha yang

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha yang perlu didorong adalah usaha-usaha padat karya yang tidak mensyaratkan kualifikasi tenaga kerja dengan kualitas tinggi, mengingat masih relatif rendahnya tingkat kualitas sumberdaya manusia di wilayah ini.

2. Peluang Usaha Sektor Informal

Peluang usaha sektor informal memiliki nilai bobot 0,160 yang merupakan kriteria dengan prioritas tertinggi kedua di antara semua kriteria. Jenis-jenis usaha di sektor informal yang berkembang di lokasi penelitian adalah antara lain pembuatan abon ikan (*skala home industri*). Sektor ini dapat menjadi prioritas mengingat bahwa karakteristik sumberdaya manusia yang ada memungkinkan sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian bekerja atau berpeluang bekerja di sektor informal ini.

3. Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan merupakan prioritas terakhir dalam aspek ekonomi (dengan nilai bobot 0,071). Pada umumnya responden menilai bahwa kesenjangan pendapatan bukan merupakan permasalahan yang mendasar. Mereka menyadari bahwa pendapatan sangat berhubungan dengan lapangan kerja dan kapasitas usaha. Karena itu

dengan terbukanya secara luas peluang usaha dan terbinanya peningkatan kapasitas usaha maka dengan sendirinya akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Aspek Sosial

Hasil analisis aspek sosial diharapkan nanti bersifat *bottom up*, sehingga akan berdampak positif dan dapat diterima serta mendapat *respons* dari masyarakat karena aspek sosial bersentuhan langsung dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat ikut serta merasa memiliki suatu kebijakan yaitu :

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Kriteria penyerapan tenaga kerja merupakan kriteria aspek sosial yang menjadi prioritas pertama (nilai bobot 0,109). Penyerapan tenaga kerja yang besar pada berbagai kegiatan ekonomi akan berimplikasi pada pemerataan pemanfaatan sumberdaya manusia setempat, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerataan disini mencakup pemerataan pembangunan, pemerataan akses untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan, serta pemerataan pendapatan.

b. Tersedianya Akses Pelayanan

Peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat merupakan kriteria aspek

sosial yang menjadi prioritas kedua (nilai bobot 0,043). Akses pelayanan yang dimaksud bukan saja dalam hal pelayanan perizinan dan infrastruktur tetapi juga kepada pelayanan pembinaan seperti pembiayaan, teknologi dan pemasaran, serta perlindungan usaha.

Meningkatnya akses pelayanan kepada masyarakat akan memberikan dampak yang positif. Jika semua unsur tersebut di atas terakses dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah melihat peluang-peluang pengembangan usaha maupun peningkatan kesejahteraan lainnya.

c. Kesenjangan Kesempatan Kerja

Mengatasi kesenjangan kesempatan kerja menempati prioritas ketiga dalam pandangan para *stakeholder* wilayah pesisir Kecamatan Abeli (nilai bobot 0,017). Masyarakat menilai bahwa hampir tidak ada faktor yang menjadi penyebab kesenjangan kesempatan kerja selain faktor permodalan. Dengan perbaikan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha maka dengan sendirinya akan terbuka peluang usaha dan kesempatan kerja.

Aspek Lingkungan

Persepsi responden terhadap pentingnya kriteria aspek lingkungan dalam pengembangan wilayah pesisir

Kecamatan Abeli relatif kecil. Hal ini terlihat dari rendahnya bobot nilai dari kriteria-kriteria aspek lingkungan yaitu :

a. Konservasi Lingkungan

Kegiatan perikanan, pariwisata, industri, perhubungan, dan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mengindahkan aspek-aspek lingkungan telah menyebabkan degradasi lingkungan pesisir Kecamatan Abeli. Persepsi responden menunjukkan bahwa kriteria konservasi lingkungan merupakan kriteria aspek lingkungan yang harus menjadi prioritas utama (nilai bobot 0,086). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius pemerintah dalam mengendalikan penurunan kualitas lingkungan tersebut.

Reklamasi pantai juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan degradasi lingkungan di Pesisir Kecamatan Abeli. Sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Abeli telah mengalami reklamasi pantai dengan tujuan industri, pelabuhan penyeberangan, pemukiman dan pariwisata. Kegiatan reklamasi tersebut kurang memperhatikan aspek teknis dan pelestarian lingkungan. Akibatnya terjadi pendangkalan, kekeruhan, abrasi, serta penyusutan produksi ikan secara berangsur-angsur karena degradasi habitat.

b. Keamanan dan Kenyamanan

Kriteria keamanan dan kenyamanan menjadi kriteria aspek lingkungan yang menjadi prioritas kedua (bobot nilai 0,028). Persepsi ini menggambarkan besarnya keinginan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Keamanan akan menjamin ketenteraman dalam masyarakat dan ketenangan berusaha. Keamanan dapat diwujudkan melalui pembinaan melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dengan pendekatan keagamaan dan kesejahteraan. Adapun kenyamanan menggambarkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

c. Pencemaran Lingkungan

Faktor yang dapat timbul sebagai dampak negatif pengembangan pesisir di Kecamatan Abeli adalah pencemaran lingkungan (0,009). Hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya, seperti membuang sampah ke laut, mengabaikan keberadaan drainase atau saluran air, dan sebagainya. Kegiatan yang memberi kontribusi bahan pencemar kepada lingkungan di Kecamatan Abeli terutama adalah industri pengolahan ikan dan limbah rumah tangga.

B. Persepsi *Stakeholder* terhadap arah pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir

Pandangan para *stakeholder* terhadap prioritas pemanfaatan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Abeli berdasarkan level kriteria dapat dilihat pada Tabel 2.

a. Pandangan *Stakeholder* : Pemerintah

Pengembangan perikanan sebagai prioritas pertama dalam pandangan pemerintah didasari oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat desa-desa pesisir di Kecamatan Abeli bekerja di sektor perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Letak wilayah yang berada di mulut Teluk Kendari sangat memudahkan akses mereka kepada daerah penangkapan ikan di sepanjang perairan pantai timur Jazirah Sulawesi Tenggara.

Pengembangan industri sebagai prioritas kedua dalam pandangan pemerintah lebih disebabkan oleh karena keberadaan PPS Kendari sebagai kawasan konsentrasi Industri Perikanan sekaligus pusat ekspor komoditi perikanan.

Prioritas berikutnya adalah pengembangan pariwisata. Keberadaan Pantai Nambo di Kelurahan Nambo sebagai salah satu obyek daya tarik wisata Kota Kendari mendasari prioritas ini. Pengelolaan Pantai Nambo yang belum

optimal oleh Pemerintah Kota Kendari belum memberi manfaat yang signifikan pada perekonomian masyarakat.

Prioritas terakhir adalah pengembangan Pelabuhan Peti Kemas. *Stakeholder* menilai bahwa penetapan dan pembangunan pelabuhan peti kemas telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2011 di Kelurahan Bungkutoko. Pada saat pengoperasiannya, pelabuhan ini dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja tidak saja dari Kecamatan Abeli tetapi juga dari wilayah-wilayah lain di Kota Kendari, dengan kualifikasi tertentu kecuali untuk buruh pikul.

b. Pandangan *Stakeholder* : Swasta

Pihak swasta menilai bahwa pengembangan ekonomi pada sektor perikanan di Kecamatan Abeli didukung oleh tenaga kerja dalam jumlah besar yang telah familiar dengan usaha di sektor ini. Perhatian yang besar dari pemerintah untuk pengembangan sektor perikanan khususnya dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan/pembudidaya memberi peluang yang besar bagi pengembangan bisnis di bidang perikanan.

Dalam hal pengembangan industri, *stakeholder* swasta menilai bahwa pengkonsentrasian industri besar dalam satu kawasan (seperti di PPS Kendari)

apalagi untuk jenis industri yang sama akan memberi nilai positif dalam kaitannya dengan kemudahan memperoleh bahan baku dan aksesibilitas pemasaran.

Dalam pandangan *stakeholder* swasta pengembangan pariwisata di Kecamatan Abeli belum dapat diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat. Luasan kawasan wisata Pantai Nambo yang sangat terbatas dan saat ini hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas khususnya sebagai pedagang makanan, akan sangat sulit untuk dikembangkan lagi skalanya. Infrastruktur wisata yang belum memadai menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan pemasarannya.

Adapun di Pulau Bungkutoko, keberadaan Pelabuhan Peti Kemas dapat dipastikan akan menutup peluang pengembangan wisata di pulau itu. Pelabuhan peti kemas sendiri, akan lebih memberi manfaat ekonomi pada Kota Kendari secara menyeluruh.

c. Pandangan *Stakeholder* : Masyarakat

Dalam pandangan *stakeholder* masyarakat, sebagian besar masyarakat pesisir Kecamatan Abeli telah secara turun-temurun menjadikan kegiatan perikanan sebagai mata pencaharian, demikian pula dengan kelompok

masyarakat pendatang yang kemudian menetap menyusul pembukaan PPS Kendari.

Ditinjau dari aspek sosial, keberadaan industri di daerah pesisir akan banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun terkadang pertumbuhan lapangan kerja tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat disebabkan tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Hal ini dapat terjadi karena kualitas sumberdaya manusia di daerah-daerah pesisir yang masih rendah. Pengembangan industri dengan teknologi sederhana dan tepat guna dapat menjadi pilihan khususnya teknologi produksi bahan mentah.

Pariwisata dalam pandangan masyarakat masih terlalu kecil peranannya dalam memutar roda perekonomian di Kecamatan Abeli. Meskipun potensi alam cukup mendukung namun berbagai keterbatasan seperti pengunjung, infrastruktur, maupun pengelolaan yang belum berbasis masyarakat semakin membatasi peluang manfaat dari obyek wisata yang ada.

Pandangan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan pelabuhan peti kemas adalah pada

umumnya memberikan apresiasi positif sebagai pendorong perekonomian regional. Namun demikian tidak banyak harapan masyarakat Abeli dari keberadaan pelabuhan ini sebagai penggerak roda perekonomian mereka. Pelabuhan hanya akan menjadi pintu masuk arus barang antar pulau, dari aspek daya serap tenaga kerja akan sangat terbatas.

Dari semua kriteria di atas yang paling perlu diperhatikan adalah aspek ekonomi, karena aspek ekonomi sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, selanjutnya aspek sosial dan aspek lingkungan. Bila faktor ekonomi sudah terpenuhi maka dengan sendirinya faktor sosial dan faktor lingkungan akan cepat teratasi.

C. Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Abeli

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012 membuat arahan pengembangan wilayah kota yang didasarkan atas pendekatan pembangunan spasial (pewilayahan pembangunan). Wilayah Kota Kendari dibagi atas tiga wilayah pengembangan BWK (Batas Wilayah Kota), yaitu: BWK I (Kawasan Mandonga), BWK II (Kawasan Kendari

Beach), BWK III (Kawasan Baruga, Poasia dan Abeli). Kawasan ini termasuk kawasan yang dipertahankan pengembangannya. Wilayah Abeli diperuntukkan selain sebagai kawasan pemukiman juga sebagai lokasi terminal tipe B dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan konsep “Kota dalam Taman”. Selanjutnya dalam Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota Kendari Tahun 2007 wilayah Kecamatan Abeli merupakan wilayah pesisir yang diarahkan bagi pengembangan perikanan, pariwisata, pelabuhan peti kemas dan Pelabuhan Perikanan Samudera, serta industri jasa dan perdagangan.

Pengembangan budidaya laut ini merupakan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pendapatan, dapat membuka peluang usaha sektor informal dan dapat mengurangi kesenjangan di antara masyarakat.

Alternatif pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Abeli berikutnya adalah pengembangan pariwisata dan pelabuhan peti kemas (masing-masing nilai bobotnya 0,108 dan 0,083). Ini terlihat dengan dimanfaatkannya pantai Nambo sebagai kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata pantai Nambo disamping meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan

retribusi, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya yakni penyewaan gazebo yang dikelola masyarakat, menjajakan makanan dan lain sebagainya. Serta pengembangan pelabuhan peti kemas di Pulau Bungkutoko.

Strategi pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli akan berjalan dengan baik, dimana semua aspek akan terpenuhi, termasuk aspek lingkungan akan terjaga. Aspek lingkungan dapat lestari dengan baik, bila kesejahteraan masyarakat sudah meningkat. Semua ini bisa terlaksana dengan baik, kalau sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya.

SIMPULAN

1. Tingkat Perkembangan pemanfaatan kawasan pesisir di Kecamatan Abeli yang tertinggi adalah Kelurahan Pudai dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kategori tinggi dan katekori rendah berturut-turut adalah Kelurahan Abeli, Kelurahan Nambo dan Kelurahan Sambuli.
2. Persepsi para *stakeholders* cenderung lebih memilih perikanan budidaya sebagai prioritas utama dalam

pengembangan dan pengelolaan kawasan-kawasan pesisir di Kecamatan Abeli Kota Kendari.

3. Prioritas utama strategi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Abeli adalah pengembangan perikanan dan sebagai alternatif pengembangan adalah industri

SARAN

1. Perlu partisipasi aktif dari pemerintah dalam pengembangan perikanan berupa: menyelenggarakan pelatihan/kursus kepada masyarakat sekitar dengan materi yang aplikatif terhadap bidang-bidang perikanan secara menyeluruh, dan memberikan bantuan modal berupa pinjaman lunak atau pinjaman tanpa bunga.
2. Perlu *political will* dari pemerintah dalam mengatur kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
3. Perlu diterapkan mekanisme pajak lingkungan terhadap industri sebagai salah satu pendekatan dalam mengendalikan pencemaran di Kecamatan Abeli Kota Kendari, termasuk kawasan pesisirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2009. Kota Kendari Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2009. Kecamatan Abeli Dalam Angka
- Bengen, B.G. 2000. Strategi dan Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor, 21-26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Center-University of Rhode Island.
- Budiharjo, E. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Penerbit Alumni Bandung.
- Budiharsono, S. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dahuri, R., 2000. Strategi dan Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor, 21-26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Center-University of Rhode Island.
- Dahuri, R., 2001. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. *Orasi Ilmiah : Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB)*.
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Duncan M. 2005. Desain program keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Kaledupa. *Laporan dalam mendukung program COREMAP di Gugus Pulau Kaledupa (unpublished)*.
- Kasim dkk. 2007. *Rencana Strategis Zonasi Kawasan Pesisir Kota Kendari*. Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup [KMNLH], Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah I [BAPEDALWIL I]. 1999. Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Hayati Kawasan Pesisir dan Lautan secara Terpadu di Provinsi Riau: BARELANG (Batam, Rempang dan Galang) dan Bintan. *Laporan Akhir Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Mulyadi, 2007. Evaluasi Implementasi Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Muna. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Haluoleo (Tidak dipublikasikan)
- Nichols, K. 2001. *Furthering Coastal Stewardship in Small Islands: Country Report-Seychelles*. Workshop paper on Environment and Development in Coastal Regions and

in Small Islands (ESI)-UNESCO.
Dominica.

Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*.
PT. Pustaka Cidesinjo, Jakarta.

Reksohadiprodjo. S., dan A.R. Karsene.,
1998. *Ekonomi Perkotaan*, Edisi
Keempat. BPFE-Yogyakarta.

Saaty, T.L. 1993. *Pengambilan Keputu-
suan Bagi Para Pemimpin* (Proses
Hierarki Analitik untuk Pengambilan
Keputusan dalam Situasi Kompleks).
Terjemahan. PT Pustaka Binaman
Pressindo.